

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Harahap, Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni.
- Irsan, Koesparmono. (2007). *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Hatta, Moh.(2010). *Hukum Acara Pidana Tanya Jawab*, Liberty Yogyakarta.
- P.Sibuea, Hotma. (2010). *Asas Negara Hukum, peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta
- Ansari, Siregar. (2005). *Metodelogi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan Pustaka Bangsa.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Atmadja, Gede. (2012). *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta.
- Siddiq, Muhammad. (2008). *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Pramita.

Hamzah, Andi. (2010). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Jayadi, Ahkam. (2015). *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikma*, Yogyakarta.

Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban dan Kejahatan*, Akademika, Jakarta.

Marpaung, Loden. (1997). *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Andi, Fadli. (2016). *Kejahatan Ham (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional)*, Jakarta: Rajawali.

S. Wojo, Warsito. (2005). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Lubis, Sofyan. (2001). *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1. Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (22).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Skripsi/Jurnal**

Purnama, Hafid. (2015). *Pemahaman Penyidik Terkait Dengan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### **Internet**

<https://www.google.com/search?q=surat+perhentian+penyelidikan+artinus+waruwu.13maret2020>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.ttml?=-453/Pid.B/2019/PN%20Kwg/.11maret2020>.

Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", [https://www`google.com/search?safe=strict&client=ms-android-skt-kr&ei=Vmgcx/10maret2020](https://www.google.com/search?safe=strict&client=ms-android-skt-kr&ei=Vmgcx/10maret2020).

